

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa selalu identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan, dipengaruhi oleh lokasinya yang terpencil dari perkotaan serta karakteristik geografi dan topografinya. Masyarakat desa mengalami keterbatasan mata pencaharian sehingga memperburuk tingkat kesejahteraan desa. Desa sering kali terjadi konflik berkepanjangan yang pada akhirnya merusak berbagai sumber-sumber dasar dan kapabilitas masyarakat (Rasyid dkk., 2023). Desa sebagai unit administrasi terkecil memiliki peran yang sangat krusial dan diharapkan menjadi titik awal bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal dan langsung dirasakan, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan (Agustina dkk., 2022).

Pemerintah menciptakan strategi pembangunan di desa untuk kemajuan pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan yang berkelanjutan. Upaya ini sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, yaitu memelihara kelangsungan kehidupan sosial masyarakat, menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, serta meningkatkan hidup yang berkualitas dan eksistensi dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Strategi ini sejalan dengan yang dimandatkan dalam Nawacita, khususnya dalam butir ketiga yang menekankan “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa” dan strategi

ini bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Bappenas, 2014).

Strategi pembangunan desa tentunya difokuskan untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan yang semakin tinggi. Seluruh potensi yang ada harus menjadi penopang gerakan desa membangun Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan desa, desa memperoleh penguatan dalam kewenangannya untuk mengelola pemerintahan, mengimplementasikan program pembangunan, menyelenggarakan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Selain penguatan kewenangannya, desa memperoleh sumber pendapatan berupa dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hibah, dan sumber pendapatan desa lainnya yang sah. Berdasarkan prinsip *money follow program* dan *money follow function*, pemerintah memberikan sumber pendapatan kepada desa yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola dan mengoptimalkan kekayaan desa yang memiliki tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomian masyarakat.

Pemerintah memberikan dana kepada setiap desa, baik dana yang diberikan melalui APBD maupaun melalui APBN. Dana yang diberikan kepada desa dibagi menjadi tiga, yaitu dana desa (sumber APBN), alokasi dana desa, serta dana bagi hasil pajak yang diperoleh dari APBD. Dana yang sudah diterima oleh desa tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan (Arina dkk., 2021).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai desa, kebijakan dana desa yang menjadi program unggulan pemerintah bertujuan agar mengurangi kemiskinan dan kesenjangan desa, serta membangun perekonomian di tingkat desa. Dengan begitu banyaknya jumlah dana yang diberikan pemerintah kepada desa dan kemudian diolah oleh desa, pemerintah berinisiatif untuk melakukan pengukuran keefektifitasannya dalam mengelola anggaran yang diberikan, yang kemudian diimplementasikan melalui Indeks Desa Membangun (IDM).

Tujuan dari pengembangan IDM yaitu agar target pembangunan prioritas yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 tercapai. Target tersebut antara lain peningkatan jumlah desa yang mandiri hingga 2000 desa dan pengurangan jumlah desa yang tertinggal hingga mencapai 5000 desa pada tahun 2019. IDM dirancang dengan prinsip bahwa pembangunan melibatkan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial sebagai proses akumulasi. Ketiga dimensi itu dianggap sebagai mata rantai yang saling mendukung, membentuk suatu rangkaian yang menjadikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Pembangunan desa diartikan sebagai upaya meningkatkan kapabilitas masyarakat desa dalam mengoptimalkan serta mengelola kekayaan yang dimiliki.

Menurut Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2016, IDM adalah suatu indeks komposit yang terbentuk dari tiga indikator utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Perangkat indikator dalam IDM disusun berdasarkan konsepsi bahwa untuk mencapai tingkat kemandirian dan kemajuan desa adalah desa yang mempunyai ketahanan sosial, ekologi, dan ekonomi yang kuat sebagai

elemen yang melengkapi serta mengoptimalkan kekayaan serta kapabilitas desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah desa dalam menciptakan kebijakan maupun aktivitas pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa diharuskan menciptakan pemerataan yang berlandaskan keadilan. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa perlu memperhatikan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal, serta prinsip ramah lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang merupakan dimensi penting dalam mencapai kemandirian serta kemajuan desa. IDM bertujuan untuk mengarahkan intervensi pembangunan pemerintah agar tepat sasaran, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa.

IDM mengategorikan desa ke dalam lima (5) status, yakni: “desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri”. Pengelompokan desa kelima status ini bertujuan agar dapat meningkatkan efektivitas intervensi kebijakan. Dengan mengetahui tingkat perkembangan desa, mempermudah pemerintah pusat dalam menciptakan dan menerapkan kebijakan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan desa tersebut.

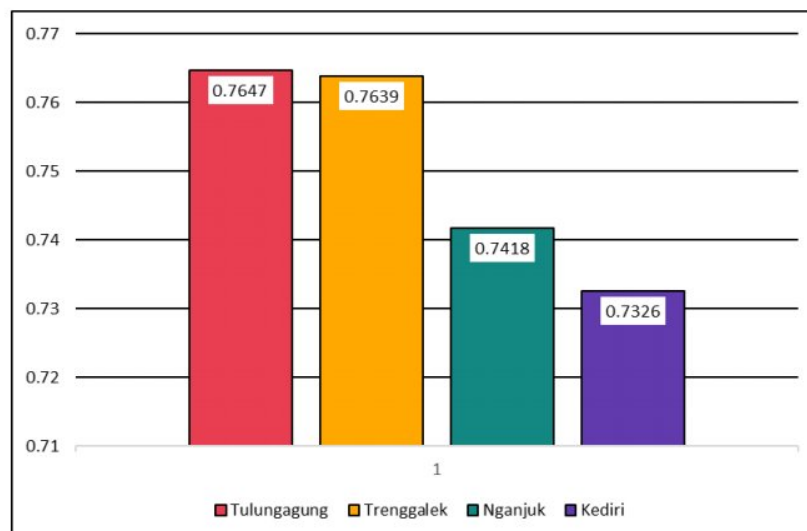
Kabupaten Tulungagung terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur, mempunyai potensi dalam Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan posisinya yang strategis. Potensi ini menjadi pendukung penting untuk memajukan pembangunan di Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya. Dengan optimalisasi pemanfaatan potensi yang ada, seperti SDA, SDM, serta dana yang dialokasikan kepada desa, dapat memberikan manfaat besar dalam pelaksanaan

proyek pembangunan. Otonomi daerah memberikan keleluasan kepada Kabupaten Tulungagung untuk dapat memanfaatkan potensi wilayahnya secara maksimal.

Dengan mengoptimalkan SDM, SDA, dan sumber daya keuangan desa, termasuk PADes, dana desa, dan alokasi dana desa, Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM). Pengoptimalan sumber-sumber tersebut menjadi sebuah kunci keberhasilan dalam mencapai *sustainable development*.

Menurut data peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022, Kabupaten Tulungagung menduduki peringkat nilai IDM tertinggi di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Kota Kediri dan sekitarnya. Hal ini dapat dilihat melalui representasi grafik sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Indeks Desa Membangun (IDM) SWP Kota Kediri dan Sekitarnya
Tahun 2022



Sumber: Kemendes PDDT, 2022

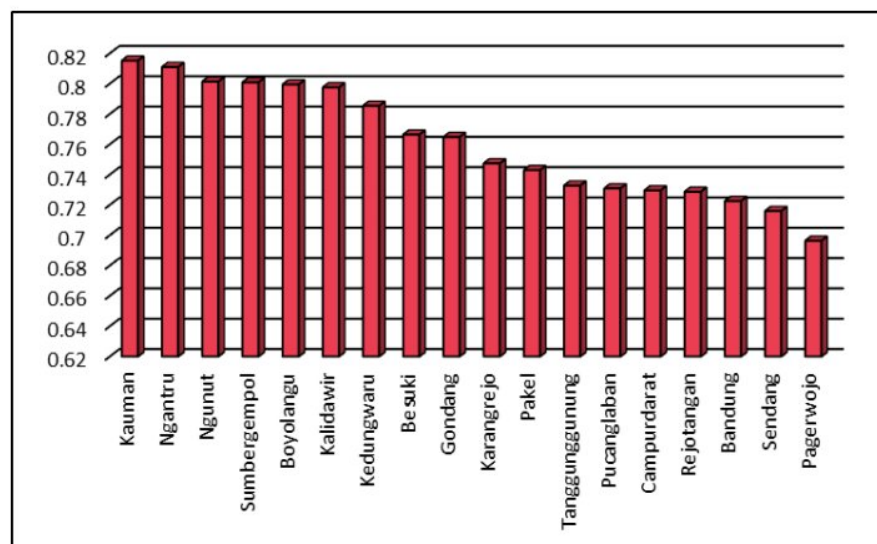
Kabupaten Tulungagung memiliki nilai tertinggi pada IDM di kawasan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Kota Kediri dan sekitarnya yaitu mencapai

sebesar 0,7647 yang tergolong maju dan nilainya di atas rata-rata IDM Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang sebesar 0,7517.

Kabupaten Tulungagung mencakup 19 Kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan dalam struktur administratifnya. Karakteristik desa di kabupaten ini mencakup dataran rendah dan dataran tinggi (pegunungan) sehingga pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Ketidakmeratanya pembangunan masih terjadi di Kabupaten Tulungagung, yang tercermin dari variasi nilai indeks desa membangun di setiap kecamatan Kabupaten Tulungagung. Beberapa kecamatan masih menunjukkan tingkat perkembangan yang belum mencapai taraf maju dan mandiri, sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Gambar 1. 2
IDM Per Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2022



Sumber: Kemendes PDDT, 2022

Berdasarkan grafik IDM di atas, Kecamatan Kauman memiliki nilai indeks desa membangun tertinggi yaitu 0,8152 termasuk kategori maju, tertinggi kedua Kecamatan Ngantru sebesar 0,811, kemudian IDM tertinggi ketiga Kecamatan

Ngunut sebesar 0,8014, dan yang memiliki nilai IDM terendah yaitu Kecamatan Pagerwojo sebesar 0,6964 termasuk kategori berkembang.

Kecamatan Kauman terletak di sebelah barat Kabupaten Tulungagung. Kecamatan ini mempunyai sebanyak 13 desa. Berdasarkan informasi dari Disdukcapil Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kecamatan Kauman mencapai 53.112 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.720 jiwa/km². Penyebaran penduduknya cukup merata karena sebagian besar tingkat kepadatannya sekitar 1.000 sampai 3000 jiwa per km². Hanya ada 2 desa yang kepadatan penduduknya dibawah 1.000 jiwa/km² karena memiliki wilayah hutan yang cukup luas. Kecamatan Kauman memiliki indeks ketahanan sosial sebesar 0,8853. Terdapat fasilitas kesehatan sebuah rumah sakit di Batangsaren, poliklinik 4 unit, puskesmas rawat inap di Bolorejo 1 unit, apotek sebanyak 7 unit. Akses menuju sarana kesehatan sudah cukup mendukung. Indeks ketahanan ekonomi sebesar 0,8115 dan indeks ketahanan lingkungan sebesar 0,7487.

Kecamatan Ngantru terletak di sebelah barat Kabupaten Tulungagung. Kecamatan ini memiliki sebanyak 13 desa. Menurut data Disdukcapil Kabupaten Tulungagung tahun 2022, jumlah penduduk Kecamatan Ngantru mencapai 59.421 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sekitar 1.612 jiwa/km². Penyebaran penduduknya cukup merata. Kecamatan Ngantru memiliki IKS sebesar 0,7908, IKE sebesar 0,7705, dan IKL sebesar 0,8734. Perkembangan infrastruktur di Kecamatan Ngantru mencakup peningkatan dalam sektor jalan, jembatan, dan penyediaan sarana air bersih.

Kecamatan Ngunut terletak di sebelah timur Kabupaten Tulungagung. Kecamatan Ngunut mempunyai sebanyak 18 desa, Menurut data Disdukcapil

Kabupaten Tulungagung tahun 2022, jumlah penduduk Kecamatan Ngunut mencapai 84.674 dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 2.246 jiwa/km². Kecamatan Ngunut memiliki IKS 0,8428, IKE sebesar 0,7611, dan IKL sebesar 0,8.

Berdasarkan hasil rekapitulasi status perkembangan IDM pada tahun 2019-2022 di Kecamatan Kauman, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan Ngunut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Status Perkembangan IDM di Kecamatan Ngantru, Kauman, dan Ngunut Tahun 2019 – 2022

Status	Kecamatan Kauman				Kecamatan Ngantru				Kecamatan Ngunut			
	Jumlah				Jumlah				Jumlah			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desa Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desa Berkembang	7	2	2	0	11	10	6	0	15	14	8	0
Desa Maju	5	10	10	7	2	3	7	6	1	2	8	13
Desa Mandiri	1	1	1	6	0	0	0	7	2	2	2	5

Sumber: Kemendes PDPT, 2022

Dari data tabel 1.1 menunjukkan adanya perkembangan IDM dari tahun ke tahun, Pada awalnya tahun 2019 di Kecamatan Kauman memiliki 7 desa dalam kategori berkembang, 5 desa maju, dan hanya ada 1 desa yang telah mencapai status mandiri. Namun, tahun 2020 dan 2021, jumlah desa berkembang naik menjadi 10 desa berkembang dan pada tahun 2021 total desa mandiri mencapai 6 desa, mengalami peningkatan sebanyak 5 desa yang telah mencapai status desa mandiri.

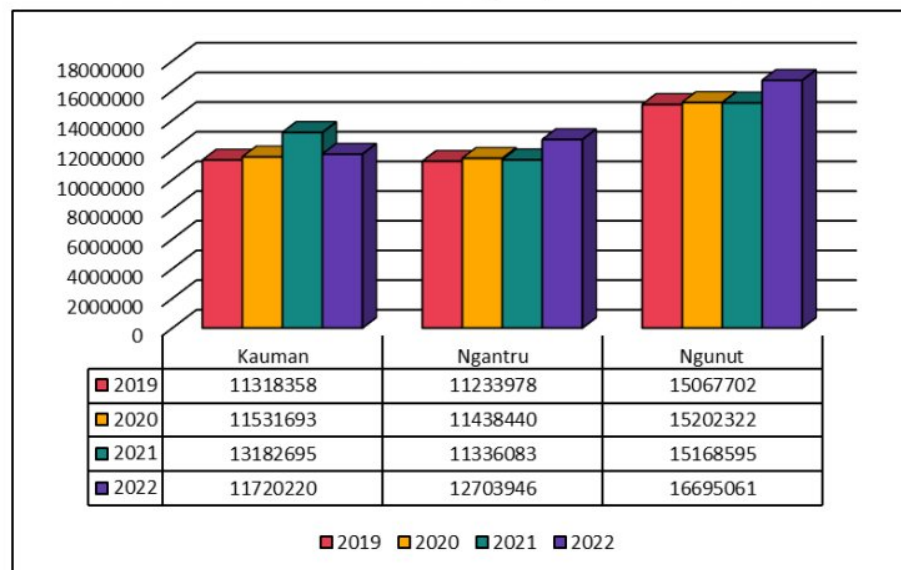
Sementara, di Kecamatan Ngantru pada tahun 2019 status desanya sekitar 85% tergolong sebagai desa berkembang dan tidak memiliki desa yang tergolong sebagai desa mandiri. Namun, tahun 2022 jumlah desa mandiri bertambah menjadi

7 desa mandiri dan jumlah desa berkembang menurun menjadi 0%, hal ini menunjukkan terjadinya perubahan status desa menjadi kategori yang lebih baik.

Begitu juga dengan Kecamatan Ngunut mengalami peningkatan dalam status desanya. Awalnya pada tahun 2019 status desanya 83% tergolong desa berkembang dan hanya ada 1 desa maju sedangkan di tahun 2022 status desanya didominasi oleh desa maju total ada 13 desa atau 72% desa tergolong maju.

Berikut ini perkembangan dana desa Kecamatan Kauman, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan Ngunut untuk rentang waktu tahun 2019-2022:

Gambar 1.3
Perkembangan Jumlah Dana Desa Tahun 2019 – 2022 (Satuan Ribu Rupiah)



Sumber: DPMD Kabupaten Tulungagung, 2022

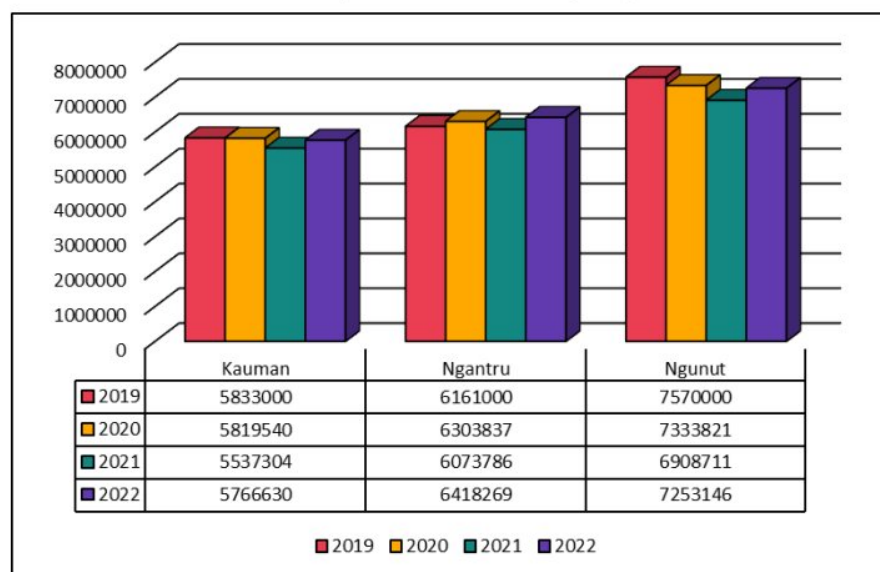
Dana Desa untuk Kecamatan Kauman, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan Ngunut dalam periode 2019-2022 menunjukkan tren peningkatan. Di Kecamatan Kauman, anggaran dana desa pada tahun 2019 mencapai 11.318.358.000 rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 anggaran dana desa menjadi 11.720.220.000 rupiah. Kecamatan Ngantru juga mengalami kenaikan, yang awalnya di tahun 2019 anggaran dana desa sebesar 11.233.978.000 rupiah meningkat menjadi sebesar

12.703.946.000 rupiah pada tahun 2022. Hal serupa terjadi di Kecamatan Ngunut, dimana anggaran dana desa yang awalnya sebesar 15.067.702.000 rupiah pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 16.695.061.000 rupiah tahun 2022.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019) program dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan dengan cara meratakan pembangunan di desa secara adil. Selain itu, juga menjadi pendorong dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di desa, kemajuan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta pengurangan tingkat kemiskinan.

Sebelum adanya Dana Desa, pengeluaran pemerintah desa di Kabupaten Tulungagung dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Grafik dibawah ini memperlihatkan alokasi dana desa untuk Kecamatan Kauman, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan Ngunut dalam periode 2019-2022:

Gambar 1. 4
Perkembangan Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 – 2022 (Satuan Ribuan Rupiah)

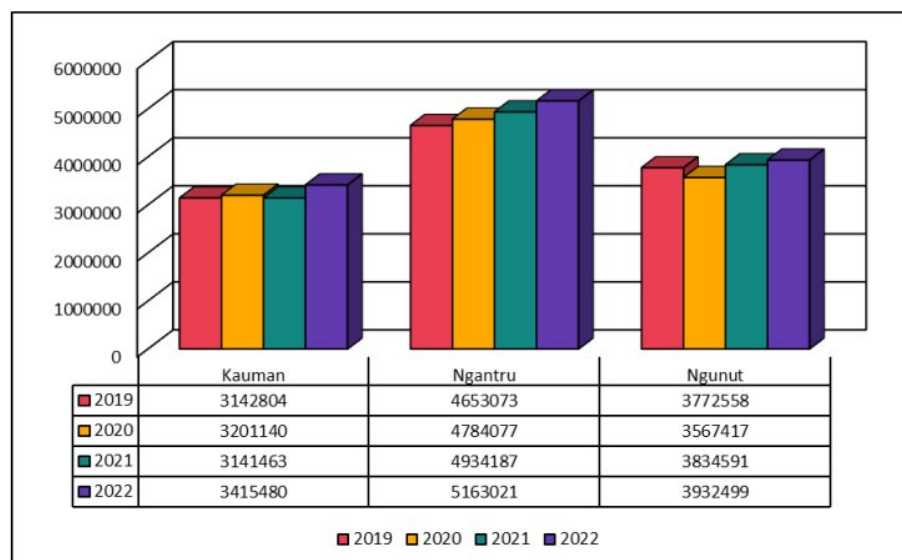


Sumber: DPMD Kabupaten Tulungagung, 2022

Perkembangan alokasi dana desa dari tahun 2019-2022. Di Kecamatan Kauman mengalami penurunan selama tahun 2019-2021, namun meningkat pada tahun 2022 menjadi 5.766.630.000 rupiah. Sementara di Kecamatan Ngantru, alokasi dana desa pada tahun 2019 sebesar 6.161.000.000 rupiah mengalami peningkatan menjadi 6.303.837.000 rupiah di tahun 2020, serta di tahun 2021 mengalami penurunan kemudian naik lagi di tahun 2022 menjadi sebesar 6.418.269.000 rupiah. Sedangkan di Kecamatan Ngunut besaran alokasi dana desa mengalami penurunan dari tahun 2019-2021, serta mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi sebesar 7.253.146.000 rupiah.

Perkembangan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kecamatan Pagerwojo selama periode tahun 2019-2022 sebagai berikut:

Gambar 1. 5
Perkembangan Jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun 2019 – 2022 (Satuan Ribu Rupiah)



Sumber: DPMD Desa Kabupaten Tulungagung, 2022

Berdasarkan grafik terlihat Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kecamatan Kauman, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan Ngunut tahun 2019-2020 cenderung mengalami peningkatan. Di Kecamatan Kauman, PADes pada tahun 2019

mencapai 3.142.804.000 rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 PADes menjadi 3.415.480.000 rupiah. Kecamatan Ngantru juga mengalami kenaikan, yang awalnya di tahun 2019 PADes sebesar 4.653.073.000 rupiah meningkat menjadi sebesar 5.163.021.000 rupiah pada tahun 2022. Hal serupa terjadi di Kecamatan Ngunut, dimana PADes yang awalnya sebesar 15.067.702.000 rupiah pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 16.695.061.000 rupiah tahun 2022.

PADes bersumber dari kekayaan, hasil usaha, swadaya, dan partisipasi masyarakat desa. Pendapatan asli desa memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan utama untuk desa tersebut. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah dalam menggali Pendapatan Asli Desa (PADes) akan berdampak pada kemajuan dan pembangunan di desa tersebut.

Pendapatan asli desa yang semakin besar artinya pemerintah desa dan seluruh masyarakat berhasil mengelola serta mengoptimalkan potensi di desa. Dengan peningkatan PADes yang semakin besar, pemdes menjadi tidak lagi bergantung sepenuhnya dengan pemberian pendanaan dari pemerintah pusat untuk belanja desa. Dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa, ketiganya merupakan sumber pendapatan yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan dan mendorong pembangunan di tingkat desa.

Berdasarkan data maupun latar belakang yang telah disampaikan oleh peneliti, informasi yang dapat diambil adalah bahwa tujuan pemberian dana desa sangat penting, yakni untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri. Harapan pemerintah pusat memberikan dana desa supaya desa menjadi desa mandiri, tetapi fakta dilapangan dilihat dari nilai IDM masih belum sesuai harapan.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun Di Kecamatan Kauman, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menyusun rumusan masalah adalah:

1. Apakah dana desa berpengaruh dalam peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Kauman, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah alokasi dana desa berpengaruh dalam peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Kauman, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh dalam peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Kauman, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana desa dalam peningkatan IDM di Kecamatan Kauman, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa dalam peningkatan IDM di Kecamatan Kauman, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam peningkatan IDM di Kecamatan Kauman, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dapat jelas dan terfokus, peneliti memberikan batasan-batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh variabel dana desa, dan alokasi dana desa, PADes, terhadap IDM di Kecamatan Kauman, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

1.5. Manfaat

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat bagi pembaca untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas terkait pengaruh dana desa, alokasi dana desa, dan PADes terhadap IDM.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Bermanfaat bagi pemerintah desa untuk mengetahui pengaruh adanya dana desa, alokasi dana desa, dan PADes dalam peningkatan IDM di Kabupaten Tulungagung dan menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan terkait dengan upaya meningkatkan IDM.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat memberikan referensi yang dapat digunakan membahas dampak dana desa, alokasi dana desa, dan PADes terhadap IDM.